

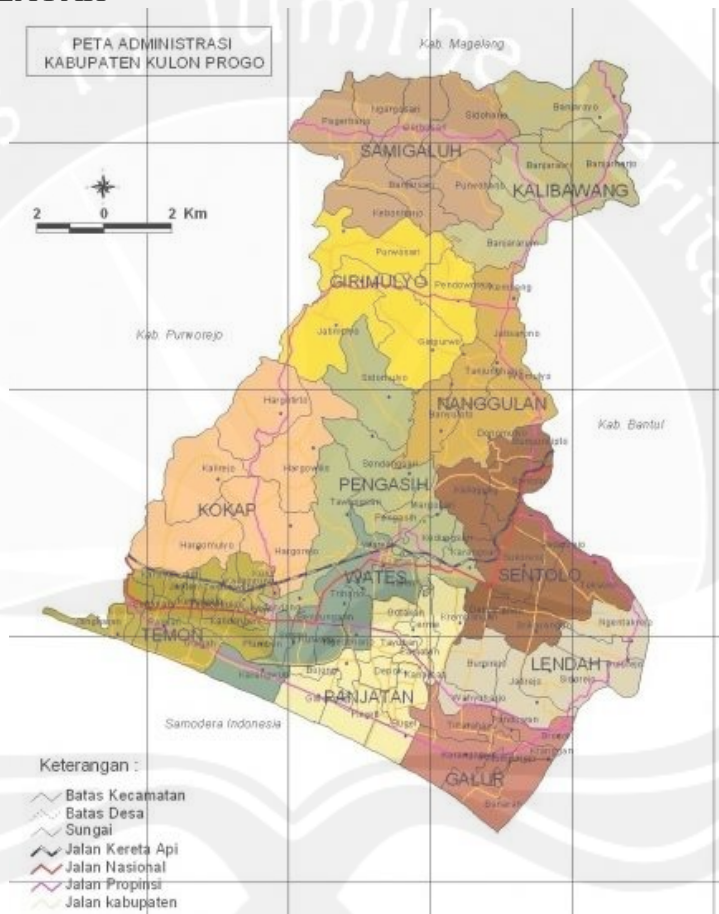
## BAB III

### DESA KARANGWUNI, KECAMATAN WATES, KULON PROGO

#### 3.1 KONDISI ADMINISTRASI KABUPATEN KULON PROGO

Data mengenai kondisi administrasi Kabupaten Kulon Progo meliputi batas wilayah dan kependudukan administrasi wilayah. Berikut penjelasan mengenai kondisi administrasi.

##### 3.1.1 BATAS WILAYAH



Gambar 3.01 Peta Kabupaten Kulon Progo

Sumber: <http://www.kulonprogokab.go.id/>

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
- Selatan : Samudra Hindia
- Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah
- Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Propinsi D. I. Yogyakarta

Kabupaten Kulon Progo berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di sebelah timur, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purwarejo Propinsi Jawa Tengah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Posisi astronomi Kabupaten Kulon Progo terletak antara 7°38'42" sampai dengan 7°59'3" Lintang Selatan dan 110°1'37" sampai dengan 110°6'26" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar.

### 3.1.2 KEDUDUKAN ADMINISTRATIF WILAYAH

Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VII memikirkan perlunya penggabungan antar wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dan wilayah Pakualam yakni Kabupaten Adikarto. Atas dasar kesepakatan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU no.18 tahun 1951 tentang penggabungan kedua wilayah tersebut di atas dan wilayah gabungannya bernama Kabupaten Kulon Progo. UU tersebut ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Sampai sekarang setiap tanggal 15 Oktober diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 kecamatan yang meliputi 87 desa, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.885 RW dan 4.469 RT.

Tabel 3.01 Kecamatan di Kulon Progo

No	Kecamatan	Pedukuhan	Rw	Rt
1	Temon	96	166	401
2	Wates	52	127	291
3	Panjaitan	100	200	402
4	Galur	75	148	311
5	Lendah	62	107	346
6	Sentolo	84	176	355
7	Pengasih	78	171	361
8	Kokap	63	154	469
9	Girimulyo	57	130	348
10	Nanggulan	61	127	385
11	Kalibawang	84	170	352
12	Samigaluh	106	209	448

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2015

### 3.2 KONDISI GEOGRAFIS DAN GEOLOGIS KECAMATAN WATES

Kecamatan Wates merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang wilayahnya mempunyai luasan terkecil dibandingkan 12 kecamatan lainnya (5,46% dari luas total Kabupaten Kulon Progo) dan merupakan salah satu dari empat kecamatan yang wilayahnya mempunyai daerah pesisir. Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur. Wilayah pesisir di Kecamatan Wates berada di Desa Karangwuni sepanjang kira-kira 2 km. Kecamatan Wates terletak di bagian selatan dari wilayah Kabupaten Kulon Progo.

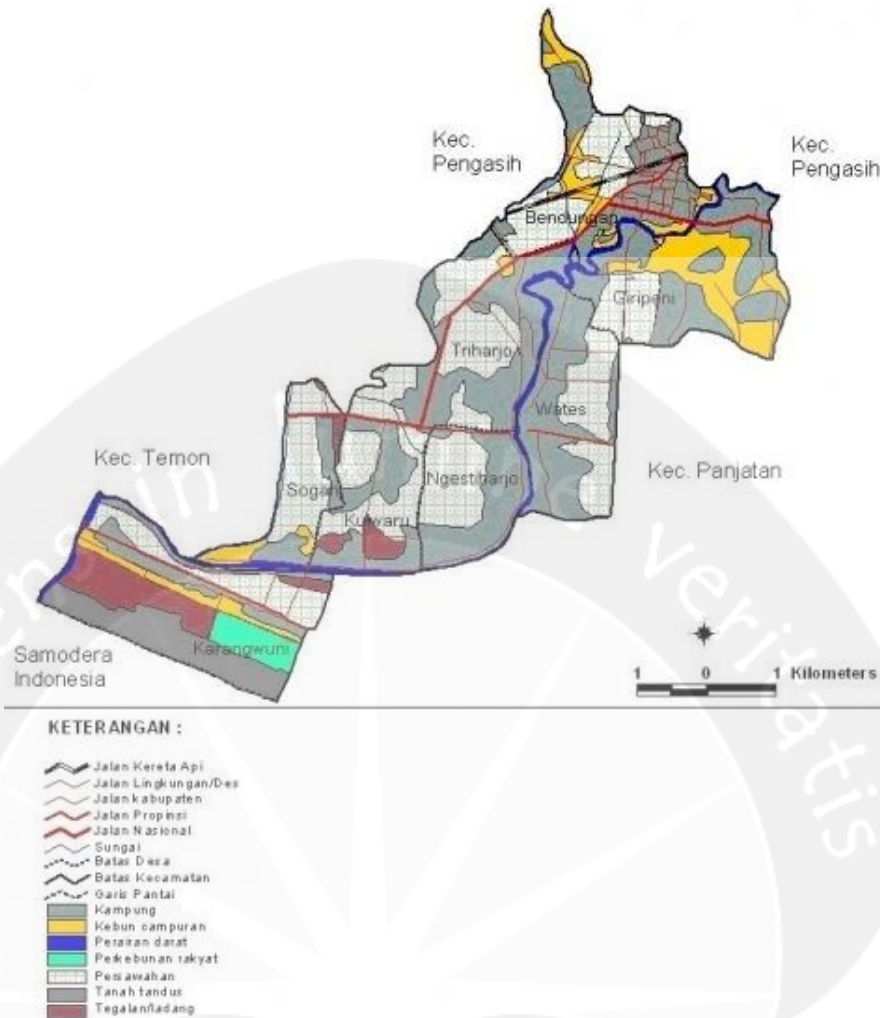
#### 3.2.1 LETAK WILAYAH

Kecamatan Wates berada 5 km di sebelah Barat Laut dari ibukota Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan Wates menempati wilayah seluas 3,2 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan sebagai berikut: Desa Bendungan (341,42 Ha), Desa Giripeni (468,55 Ha), Desa Triharjo (481,88 Ha), Desa Ngestiharjo (255,61), Desa Sogan (250,45 Ha), Desa Kuwaru (251,74), Desa Karangwuni (722,35 Ha) dan Kelurahan Wates (428,24 Ha).

Secara geografis Kecamatan Wates berbatasan dengan:

- Utara : Kecamatan Pengasih
- Selatan : Samudera Hindia
- Barat : Kecamatan Pengasih, Kecamatan Temon
- Timur : Kecamatan Panjatan

Selain kota Wates yang berada di dalam Kecamatan Wates, terdapat pula PPI Karangwuni dan Jalur Lintas Selatan Jalan Deandles yang menjadikan Kecamatan Wates sebagai kawasan yang akan berkembang dengan pesat.



Gambar 3.02 Peta Kecamatan Wates  
 Sumber: <http://www.kulonprogokab.go.id/>

### 3.2.2 TOPOGRAFI WILAYAH

Topografi wilayah Kecamatan Wates sebagian besar merupakan daerah dataran/hamparan dengan ketinggian antara 6-18 mdpl, namun juga memiliki daerah yang berada di daerah berbukit. Bentuk wilayah Kecamatan Wates dataran datar sampai berombak 92,37% dan dataran berombak sampai berbukit 7,62%. Topografi wilayah Kecamatan Wates paling rendah berada di Desa Karangwuni sebagai desa pesisir dan paling tinggi berada di Desa Bendungan.

### 3.2.3 STRUKTUR TANAH

Struktur tanah di Kecamatan Wates tergolong dalam jenis tanah tanah lumpur endapan (*alluvial*). Jenis tanah ini berasal dari erosi pegunungan Menoreh dari Kokap dan Clereng selama berpuluh tahun.

### 3.2.4 HIDROLOGIS

Kecamatan Wates dilalui oleh sebuah Kali, yaitu Kali/kali Serang. Kali Serang bermuara di sebelah barat Pantai Kwaru, di pesisir selatan Jawa. Terdapat beberapa anak sungai yang mengalir ke Serang, seperti Kali Krasak (berhulu di Gunung Merapi), Kali Elo, Kali Deres, Kali Kuas dan Kali Tinalah. Di daerah sekitar muara, banyak dijumpai penambangan pasir.



Gambar 3.03 Kali Serang

Sumber: <https://www.google.co.id/search?q=muara+kali+Serang/>

### 3.2.5 KEKAYAAN DAN KEKHASAN FLORA DAN/ATAU FAUNA

Flora yang menjadi identitas Kabupaten Kulon Progo yang juga terdapat di Kecamatan Wates adalah manggis kaligesing. Sedangkan fauna yang menjadi khas dari kecamatan Wates adalah burung kacer.



Gambar 3.04 Manggis Kaligesing

Sumber: <http://www.kulonprogokab.go.id/>



Gambar 3.05 Burung Kacer

Sumber: <http://www.kulonprogokab.go.id/>

## 3.3 KONDISI KLIMATOLOGIS KECAMATAN WATES

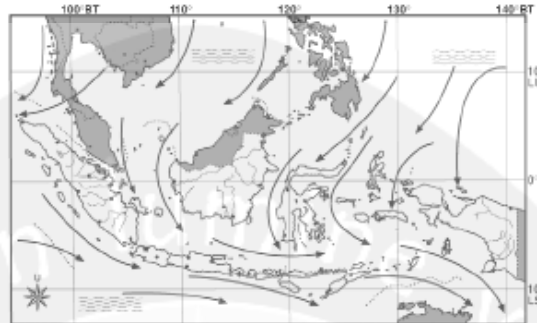
Data mengenai kondisi klimatologis Kecamatan Wates meliputi temperatur udara, arah angin dan curah hujan. Berikut penjelasan sub-sub bab tersebut.

### 3.3.1 TEMPERATUR UDARA

Kecamatan Wates beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan ciri khas cuaca panas. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Wates adalah 37°C dan suhu terendah adalah 20°C.

### 3.3.2 ARAH ANGIN

Pada musim hujan, secara tetap angin bertiup dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian utara Laut Jawa. Sementara pada musim kemarau, angin kering bertiup dari arah Benua Australia di tenggara.



Gambar 3.06 Angin Muson Barat (Musim Hujan)

Sumber: [http://www.bmkg.go.id/BMKG\\_Pusat/Informasi\\_Cuaca](http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Informasi_Cuaca)



Gambar 3.07 Angin Muson Timur (Musim Kemarau)

Sumber: [http://www.bmkg.go.id/BMKG\\_Pusat/Informasi\\_Cuaca](http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Informasi_Cuaca)

### 3.3.3 CURAH HUJAN

Curah hujan di Kecamatan Wates seperti pada daerah lain di Kabupaten Kulon Progo dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam satu tahun terjadi 2 kali pergantian musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang masing-masing terbagi dalam 6 bulan.

Curah hujan di Kecamatan Wates (<http://wates.kulonprogokab.go.id/pages-39-profil-kecamatan.html> diakses pada 6 Oktober 2015)

1. Jumlah hari hujan : 58 hari
2. Banyaknya curah hujan : 1.152,7 mm/tahun

### 3.4 KONDISI SOSIAL-BUDAYA-EKONOMI KECAMATAN WATES

Kondisi sosial-budaya-ekonomi Kecamatan Wates meliputi kependudukan, adat istiadat, kesenian, religi, norma kemasyarakatan, kegiatan perekonomian dan sejarah wilayah. Untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut.

#### 3.4.1 KEPENDUDUKAN

Estimasi jumlah penduduk Kecamatan Wates pada tahun 2014 sebanyak 45.751 jiwa. Kelurahan Wates memiliki jumlah penduduk terbanyak mencapai 14.094 jiwa di tahun 2013, sementara Desa Sogan merupakan desa dengan jumlah jiwa yang paling sedikit yaitu 1.884 jiwa pada tahun 2013.

Tabel 3.02 Jumlah Penduduk Kecamatan Wates tahun 2014 (jiwa)

Desa/ Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. Karangwuni	1.521	1.553	3.074
2. Sogan	920	964	1.884
3. Kulwaru	1.266	1.378	2.644
4. Ngestiharjo	1.467	1.534	3.001
5. Triharjo	3.279	3.486	6.765
6. Bendungan	3.151	3.238	6.389
7. Giripeni	3.835	4.065	7.900
8. Wates	6.978	7.116	14.094
Jumlah	22.417	23.334	45.751

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Wates, 2015

Kelurahan Wates wilayahnya 13% dari keseluruhan luas kecamatan namun merupakan wilayah yang paling padat di Kecamatan Wates. Kelurahan Wates merupakan wilayah perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjangkau berbagai fasilitas yang tersedia.

Tabel 3.03 Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Wates tahun 2014 (rumah)

Desa/ Kelurahan	2011	2012	2013
1. Karangwuni	833	842	857
2. Sogan	513	518	528
3. Kulwaru	695	703	716
4. Ngestiharjo	795	804	818
5. Triharjo	1.761	1.781	1.813
6. Bendungan	1.605	1.622	1.652
7. Giripeni	2.068	2.091	2.129
8. Wates	3.721	3.759	3.829
Jumlah	11.991	12.120	12.342

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Wates, 2015

Jumlah rumah tangga di Kecamatan Wates pada tahun 2014 sebanyak 12.342 rumah tangga. Dengan demikian secara rata-rata dalam setiap rumah tangga terdiri dari 4 jiwa.

Tabel 3.04 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Wates tahun 2014

Desa/ Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1. Karangwuni	7,22	3.074	426
2. Sogan	2,50	1.884	754
3. Kulwaru	2,52	2.644	1.049
4. Ngestiharjo	2,56	3.001	1.172
5. Triharjo	4,82	6.765	1.404
6. Bendungan	3,41	6.389	1.874
7. Giripeni	4,69	7.900	1.684
8. Wates	4,28	14.094	3.293
Total	32,00	45.751	1.430

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Wates, 2015

Kepadatan penduduk merupakan pembagian antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk menggambarkan rata-rata banyaknya penduduk yang menempati luasan per km<sup>2</sup> suatu wilayah. Pada tahun 2013 kepadatan penduduk di Kecamatan Wates mencapai 1.430 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah paling padat adalah kelurahan Wates dengan 3.293 jiwa/km<sup>2</sup> dan wilayah dengan tingkat kepadatan terendah adalah Desa Karangwuni sebesar 426 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kepadatan penduduk yang rendah di Desa Karangwuni dikarenakan memiliki wilayah yang luas dan berfungsi sebagai sempadan pantai. Sedangkan pada daerah permukiman/kampung memiliki kepadatan.

### 3.4.2 ADAT ISTIADAT

Pada daerah di kecamatan Wates, adat istiadat berupa upacara massal cukup minim walaupun dekat dengan laut. Walau demikian, masyarakat Jawa terutama di kecamatan Wates masih menjalankan acara perayaan syukuran, slametan dan sesajian untuk menghotmati rahmat dari Sang Pencipta.

Acara adat terbesar yang dilaksanakan di pantai Glagah adalah Labuhan Pura Pakualam. Tujuan dari upacara adat ini adalah memanjatkan doa dan harapan bersama agar loro-loroning atunggal Keraton dan Pura Pakualam serta masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat karunia, ketentraman dan berkah menuju segalanya yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Upacara



ini adalah bentuk pelaksanaan ritual rutin tahunan budaya leluhur yang selalu dilaksanakan bertepatan dengan 10 Muharam atau 10 Sura menurut penanggalan Jawa.



Gambar 3.08 Labuhan Pura Pakualam

Sumber: <http://budparpora.kulonprogokab.go.id/pages-69-labuhan-pura-pakualaman.html>

Uborampe yang akan dilabuh tersaji atas tiga gunung, yaitu yang berupa hasil bumi yang terdiri atas aneka macam buah dan umbi-umbian, gunung berupa padi, serta gunung yang disebut pengagem (pakaian) yang terdiri atas kain dan selendang. Sesudah memanjatkan doa yang diikuti seluruh peserta labuhan yang terdiri dari keluarga keraton Puro Pakualaman, juru kunci Puro Pakualam, Prajurit Lombok Abang dan Prajurit Plangkir serta masyarakat umum ketiga gunung dan seluruh peserta akan berangkat berarak-arak menuju Pantai Glagah yang berjarak sekitar 2 km dari pesanggrahan Puro Pakualaman.



Gambar 3.09 Masyarakat Turut Serta dalam Labuhan Pura Pakualam

Sumber: <http://budparpora.kulonprogokab.go.id/pages-69-labuhan-pura-pakualaman.html>

Acara puncaknya warga masyarakat yang mengikuti bisa mendapatkan berkah gunung yang dilabuh ke laut. Terdapat keyakinan jika mendapatkan beberapa bagian sesaji atau uborampe yang sudah didoakan dalam labuhan maka akan mendapatkan berkah kebaikan dalam kehidupan. Nilai utama dari upacara adat Labuhan Pura Pakualaman ini adalah harapan agar masyarakat selalu menjaga tradisi budaya dan selalu bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas segala

pemberian-Nya (<http://budparpora.kulonprogokab.go.id/pages-69-labuhan-pura-pakualaman.html> diakses pada 3 Oktober 2015).



Gambar 3.10 Melarung Sesajian Ke Laut

Sumber: <http://budparpora.kulonprogokab.go.id/pages-69-labuhan-pura-pakualaman.html>

### 3.4.3 KESENIAN

Di Kecamatan Wates terdapat beberapa perkumpulan kesenian, yaitu:

Tabel 3.05 Kesenian di Kecamatan Wates

No.	Jenis Kesenian	Jumlah Kelompok
1	Jatilan	9
2	Incling	1
3	Angguk	1
4	Karawitan	1
5	Keroncong	1
6	Solawatan	19
7	Kutilang	1
8	Gejlok Lesung	1
9	Orkes Melayu	2
10	Pop Vokal Grup	2
11	Mocopat	4
12	Musik Bambu	1
13	Paduan Suara	3
14	Campur Sari	6
15	Ketoprak	7
16	Pedangan	1

Sumber: Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2015

Di desa Karangwuni sendiri terdapat beberapa kesenian yang sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Kesenian tersebut antara lain karawitan, solawatan dan ketoprak. Kesenian ketoprak di desa Karangwuni bernama Organisasi Pantai Muda Budaya yang berdiri sejak tahun 1980. Kesenian-kesenian ini melakukan latihan dan pentas di Balai Desa.



Gambar 3.11 Kesenian Karawitan, Solawat dan Ketoprak  
Sumber: Berbagai Sumber, 2016

#### 3.4.4 RELIGI

Sebagian besar penduduk Kecamatan Wates memeluk agama Islam sebanyak 95,55%, agama Kristen 2,09%, agama Katolik 2,30%, agama Hindu 0,04% dan agama Buddha 0,01%. Sedangkan tempat peribadan yang dimiliki Kecamatan Wates ada 80 masjid, 101 mushola, 19 langgar, 5 gereja dan 4 rumah kebaktian.

#### 3.4.5 NORMA KEMASYARAKATAN

Norma kemasyarakatan berlaku umum bagi seluruh masyarakat Jawa, termasuk masyarakat yang berada di Kecamatan Wates. Masyarakat Jawa identik dengan dua prinsip yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu prinsip kerukunan dan hormat. Prinsip kerukunan misalnya seperti mementingkan kepentingan umum dan gotong royong. Prinsip hormat misalnya ramah dan menghargai siapa saja yang ia temui dan memakluminya.

Bila dilihat pada karakteristik masyarakat Yogyakarta mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan dengan masyarakat dari daerah lain, terutama karena sangat diwarnai kehidupan berbudaya yang melekat dalam perkembangan sosial masyarakat. Di antara karakteristik sosial dari masyarakat Yogyakarta yang menonjol adalah sikap toleransi yang tinggi, menjunjung nilai-nilai budaya, norma-norma sosial serta moral.

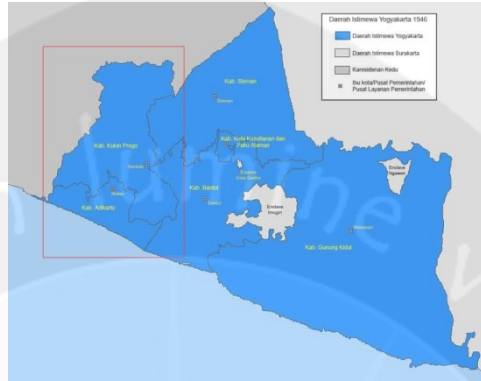
Sedangkan bila ditinjau dari visi Kecamatan Wates, norma masyarakat yang dijunjung adalah masyarakat yang sehat, mandiri, terampil, sejahtera berdasarkan iman dan taqwa (<http://wates.kulonprogokab.go.id/pages-9-visi-misi.html> diakses pada 3 Oktober 2015)

#### 3.4.6 KEGIATAN PEREKONOMIAN

Kegiatan perekonomian sesuai dengan fungsi kecamatan Wates yaitu seputar kegiatan administratif di pemerintahan dan kegiatan komersial seperti pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, jasa dan industri.

### 3.4.7 SEJARAH WILAYAH

Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951, wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualam.



Gambar 3.12 Wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta  
Sumber: <http://wates.kulonprogokab.go.id/Pemerintah-Kabupaten-Kulon-Progo/sejarah.html>

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten yaitu: Kabupaten Pengasih tahun 1831, Kabupaten Sentolo tahun 1831, Kabupaten Nanggulan 1851 dan Kabupaten Kalibawang tahun 1855.

Di wilayah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarta. Pada tahun 1813 KGPA Ario Paku Alam I mendapat palungguh di sebelah barat Sungai Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu. Tanah pelungguh terletak berpencaran kemudian disatukan menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat kabupaten dan diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot.

Kabupaten Karang Kemuning terdiri dari tanah rawa-rawa yang kemudian dikeringkan menjadi tanah yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur). Oleh karena itu nama Karang Kemuning menjadi Adikarto pada tahun 1877 yang beribukota

di Bendungan. Kemudian pada tahun 1903 ibukota dipindahkan ke Wates yang terdiri dari dua kawedanan yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur.

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah beliau yaitu Kasultanan Ngayogyakarta dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Atas dasar kesepakatan tersebut pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No.15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto menjadi satu Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan sejarah tersebut, kecamatan Wates merupakan daerah yang berperan cukup penting dalam sejarah Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan Wates yang dahulunya masuk dalam Kabupaten Adikarto merupakan tanah Pakualam terutama di daerah pesisir pantai yaitu Desa Karangwuni terdapat area Pakualam Ground. Pakualam Ground ini dijaga oleh warga setempat dan dimanfaatkan pula menjadi tanah Pelabuhan Tanjung Adikarto.



Gambar 3.13 Pakualam Ground Di Desa Karangwuni  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015

### 3.5 KEBIJAKAN OTORITAS KECAMATAN WATES

Berikut adalah kebijakan otoritas Kecamatan Wates berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2023.

### 3.5.1 KEBIJAKAN POLITIS

Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala propinsi atau beberapa kabupaten/kota, yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. PKWp berada di Perkotaan Wates dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olahraga, perdagangan dan jasa.

Sistem pusat permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan pedesaan secara hirarki meliputi kota tani yaitu di Desa Sogan, Desa Karangwuni Kecamatan Wates.

### 3.5.2 KEBIJAKAN TATA KAWASAN

Kecamatan Wates terdiri menjadi beberapa tipe kawasan, antara lain:

- a. Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:
  1. kawasan sempadan pantai;
  2. kawasan sempadan sungai;
  3. kawasan sekitar waduk; dan
  4. RTH kawasan perkotaan.
- b. Kawasan sempadan, terdiri atas:
  1. Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang Pantai Samudera Hindia dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
  2. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Sungai Progo, Sungai Serang, dan Sungai Bogowonto serta anak-anak sungainya dengan luas kurang lebih 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) hektar.
- c. RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan luas kurang lebih 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) hektar atau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan kawasan perkotaan berada di seluruh ibukota kecamatan.

- d. Kawasan peruntukan ruang hijau terdiri atas:
1. Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi: Kecamatan Wates dengan luas 184 (seratus delapan puluh empat) hektar;
  2. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) hektar.
  3. Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas komoditas: kakao, jambu mete.
- e. Kawasan peruntukan perikanan  
Kecamatan Wates ditetapkan sebagai **kawasan Minapolitan**, yaitu pusat perikanan budidaya dan tangkap, meliputi:
1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah pantai sepanjang 24,9 (dua puluh empat koma sembilan) kilometer sampai dengan 4 (empat) mil laut ke Samudera Hindia.
  2. Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    - a. budidaya perikanan darat
    - b. budidaya perikanan air payau
  3. Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
    - a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI), meliputi : TPI di pelabuhan pendaratan ikan Tanjung Adikarta Desa Karangwuni Kecamatan Wates.
    - b. Pasar induk perikanan di sekitar Kompleks Perdagangan Gawok Kecamatan Wates.
- f. Pengembangan permukiman khusus, yaitu **permukiman nelayan** berada di **Desa Karangwuni**, Kecamatan Wates.
- g. Kawasan peruntukan pertambangan yaitu kawasan strategis pertambangan pasir besi di wilayah pantai di Desa Karangwuni Kecamatan Wates;
- h. Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Monumen Nyi Ageng Serang berada di Kecamatan Wates.

- i. Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  1. Pos TNI Angkatan Laut berada di Desa Karangwuni Kecamatan Wates
  2. Markas Komando Distrik Militer berada di Desa Triharjo Kecamatan Wates;

### 3.5.3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan, meliputi pengembangan Perkotaan Wates sebagai pusat Pemerintahan Daerah dan pusat pengembangan utama Kabupaten. Kebijakan pembangunan di Kecamatan Wates antara lain:

- A. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Wates.
- B. Pengembangan jembatan timbang berada di Kecamatan Wates.
- C. Jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berupa trayek angkutan penumpang meliputi :
  1. Angkutan penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melayani Perkotaan Wates dengan kota-kota lain di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani Perkotaan Wates ke kota-kota lain di dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi
    - a. Wates – Sentolo - Jogja; dan
    - b. Wates – Bantul – Jogja.
- D. Pengembangan stasiun perkeretaapian melalui pengoptimalan peran dan fungsi Stasiun Wates dan pembangunan jaringan jalan KA Stasiun Kalimenur – Panjatan – Karangwuni.
- E. Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur.
- F. Pengembangan sumberdaya energi angin dan gelombang laut berada di Pantai Selatan
- G. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, yaitu Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Adikarta di Desa Karangwuni Kecamatan



Wates dan sebagian Desa Glagah Kecamatan Temon dengan luas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektar;

### 3.6 KAWASAN MINAPOLITAN

Di dalam RTRW Kulon Progo 2012-2032 Kecamatan Wates, terutama Desa Karangwuni masuk dalam kawasan Minapolitan. Minapolitan merupakan bagian dari kawasan Agropolitan, dimana berasal dari kata Mina yang berarti ikan dan Politan yang berarti kawasan.

#### 3.6.1 PENGERTIAN KAWASAN MINAPOLITAN

Kawasan Agropolitan menurut UU Penataan Ruang No.26/2007 didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Kawasan Minapolitan berdasarkan turunan kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengolahan sumber daya tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis. Minapolitan/agropolitan menurut Friedman dan Douglass (1985) dalam Zulham (2010) adalah aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk antara 50.000 jiwa sampai dengan 150.000 jiwa.



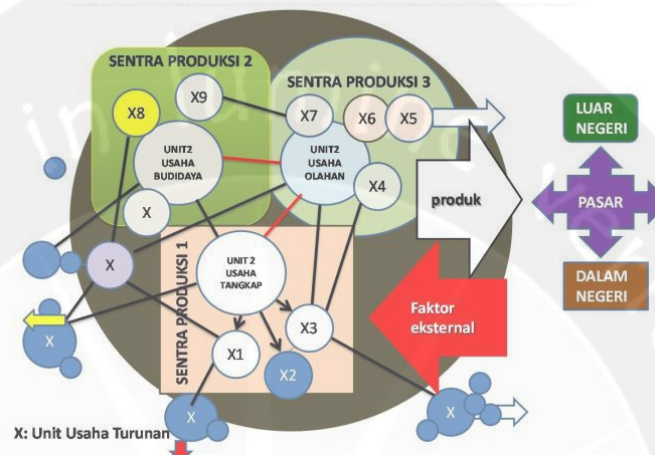
Gambar 3.14 Aktivitas Masyarakat Kawasan Minapolitan  
Sumber: [www.google.com/minapolitan](http://www.google.com/minapolitan)

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan,

pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya (Zulham, 2010).

### 3.6.2 KARAKTERISITIK KAWASAN MINAPOLITAN

Karakteristik kawasan minapolitan adalah terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan. Sentra tersebut berbasis kelautan dan perikanan serta mempunyai *multiplier effect* tinggi terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.



Gambar 3.15 Model Kawasan Minapolitan

Sumber: [www.google.com/model-kawasan-minapolitan](http://www.google.com/model-kawasan-minapolitan)

Karakteristik kedua adalah mempunyai keanekaragaman kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, kesehatan dan sosial yang saling mendukung. Selain itu juga mempunyai sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi sebagaimana layaknya sebuah kota (Sunoto, 2011).

### 3.6.3 PERSYARATAN KAWASAN MINAPOLITAN

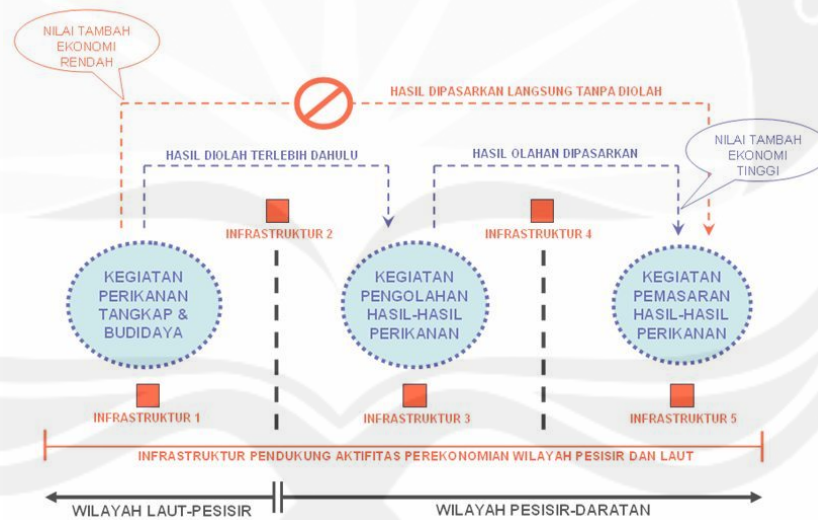
Persyaratan Kawasan Minapolitan meliputi:

- Memiliki lahan dan perairan yang sesuai untuk pengembangan komoditas perikanan.
- Memiliki sistem dan mata produksi.
- Memiliki sarana umum lainnya seperti transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih, dll.
- Memiliki berbagai sarana dan prasarana minabisnis yaitu: pasar, lembaga keuangan, kelompok budidaya, balai benih ikan, penyuluhan dan bimbingan teknis, jaringan jalan, irigasi.
- Adanya komitmen daerah untuk membangun kawasan Minapolitan.

### 3.6.4 SASARAN DAN LANGKAH STRATEGIS MENUJU KAWASAN MINAPOLITAN

Kawasan Minapolitan memiliki 3 sasaran utama yaitu pertama, menguatnya ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil, usaha kelautan serta perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi. Sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan dilaksanakan melalui langkah-langkah strategis. Antara lain menggerakkan produksi di sentra-sentra produksi unggulan pro usaha kecil di bidang perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan.

Kedua, mengembangkan Kawasan Minapolitan dengan cara mengintegrasikan sentra-sentra produksi menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah. Ketiga, pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra-sentra produksi unggulan serta pengintegrasian Kebijakan Makro lintas sektoral, pusat dan daerah.



Gambar 3.16 Hubungan Wilayah Laut Pesisir dan Darat Minapolitan  
Sumber: Sunoto, 2011

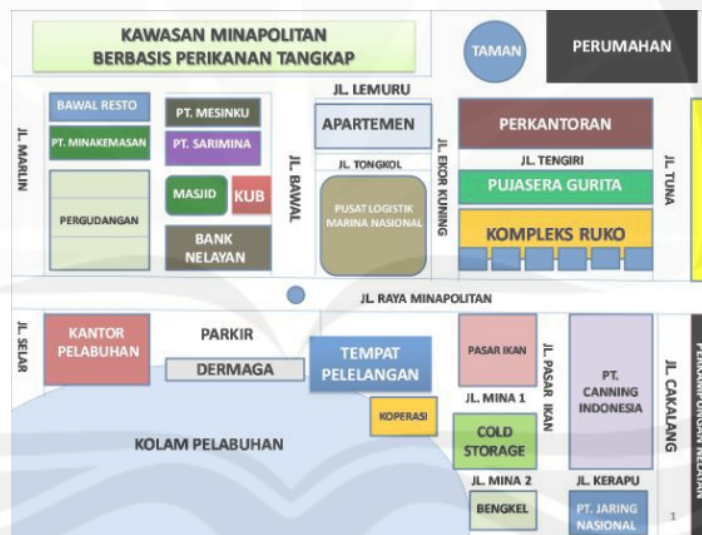
### 3.6.5 KONSEP KAWASAN MINAPOLITAN

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan cara konsep minapolitan dimana salah satu tujuan konsep ini untuk mengembangkan kawasan ekonomi unggulan menjadi lebih produktif. Sebagai langkah nyata, telah diterbitkan Peraturan Menteri nomor 12/2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Mengingat pengembangan kawasan minapolitan ini

menggunakan potensi lokal, maka konsep ini sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial lokal (*local social culture*).



Gambar 3.17 Kawasan Minapolitan Berbasis Budaya: DESA SUKA MAJU  
Sumber: Sunoto, 2011



Gambar 3.18 Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap  
Sumber: Sunoto, 2011

Konseptual Minapolitan mempunyai dua unsur utama yaitu, Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Secara ringkas Minapolitan dapat didefinisikan sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip integrasi, efisiensi dan kualitas serta akselerasi tinggi. Sementara itu, Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-

sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait.

Dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan secara terintegrasi, perlu disusun masterplan pengembangan kawasan minapolitan yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan. Adapun muatan yang terkandung didalamnya adalah:

A. Penetapan pusat agropolitan/minapolitan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986):

1. Pusat perdagangan dan transportasi perikanan (*aquacultural trade/transport center*).
2. Penyedia jasa pendukung perikanan (*aquacultural support services*).
3. Pasar konsumen produk non-perikanan (*non aquacultural consumers market*).
4. Pusat industry perikanan (*aqua based industry*).
5. Penyedia pekerjaan non perikanan (*non-aquacultural employment*).
6. Pusat minapolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/Kabupaten).

B. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986):

1. Pusat produksi perikanan (*aquacultural production*).
2. Intensifikasi perikanan (*aquacultural intensification*).
3. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non-perikanan (*rural income and demand for non-aquacultural goods and services*).
4. Produksi ikan siap jual dan diversifikasi perikanan (*cash fish production and aquacultural diversification*).

C. Penetapan sektor unggulan:

1. Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya.
2. Kegiatan minabisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan local).

3. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.

#### D. Dukungan sistem infrastruktur

Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan diantaranya: jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).

#### E. Dukungan sistem kelembagaan.

1. Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan minapolitan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dengan fasilitasi pemerintah pusat.
2. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan minapolitan.

Melalui keterkaitan tersebut, pusat minapolitan dan kawasan produksi perikanan berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini dapat untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produksi kawasan minapolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan.

### **3.7 LOKASI TAPAK KAMPUNG NELAYAN**

Setelah didapatkan berbagai data tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus tentang Kabupaten Kulon Progo dan Kecamatan Wates, maka selanjutnya dilakukan pemilihan lokasi kawasan tapak. Pemilihan wilayah tapak untuk kawasan Minapolitan yang ditentukan oleh beberapa kriteria sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032 dan persyaratan kawasan Minapolitan.

Menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032 desa yang ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan adalah Desa Karangwuni di Kecamatan Wates. Berikut profil Desa Karangwuni.

#### **3.7.1 SEJARAH SINGKAT DESA KARANGWUNI**

Desa Karangwuni ketika berdiri adalah bagian dari Kapenewon Wates Kadipaten Adikarto yang sebelumnya bernama Kadipaten Karang Kemuning karena dahulu merupakan rawa yang berwarna kuning. Upaya pengeringan rawa

dilakukan dengan pembuatan drainase dan penyudetan Kali Glagah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan dalam bentuk Bok Ireng.

Pemerintah distrik Karangwuni dipimpin oleh Raden Kartodiprojo dengan dibantu oleh Demang Jero Wetan Puspodiwiryo dan Jero Kulon Padmodiwiryo. Pada tahun 1910 dimulai Pemerintahan Galongan dengan Lurah Padmodiwiryo sampai pembaharuan pemerintahan desa otonomi 1947 yang digantikan oleh Lurah Pademo Sutaryono (1947-1960). Secara berturut-turut Pemerintahan Desa Karangwuni dipimpin oleh Lurah Pawiro Suprpto (1961-1965), Pawiro Suharjo (1966-1987), Drs. Sukadi (1988-1998), Winarto (1999-2007), Sutarman (2008-2012) dan sampai sekarang Wasul Khasani.

### 3.7.2 LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH DESA KARANGWUNI

Desa Karangwuni terletak pada koordinat  $7^{\circ}54'59''S$  dan  $110^{\circ}5'52''E$  dengan total luas wilayah 722,35 hektar.



Gambar 3.19 Wilayah Desa Karangwuni  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015

Batasan Desa Karangwuni yaitu:

- Utara : Desa Kulwaru, Desa Sogan dan Desa Plumbon Kecamatan Wates
- Barat : Desa Kalidengen dan Desa Glagah, Kecamatan Glagah
- Selatan : Samudera Hindia
- Timur : Desa Garongan dan Desa Bojong Kecamatan Panjatan

Desa Karangwuni terbagi menjadi 6 Pedukuhan, 12 RW dan 24 RT. Padukuhan tersebut antara lain Dusun Keboan, Dusun Karangwuni, Dusun Pancas, Dusun Kriyan, Dusun Karangrejo dan Dusun Karanganyar. Berdasarkan data Monografi Desa Karangwuni per 31 Desember 2013 jumlah penduduk Desa

Karangwuni berjumlah 3.074 jiwa. Sedangkan pemanfaatan tanah di Desa Karangwuni meliputi sawah seluas 143,27 Ha, tegalan 321,71 Ha, pekarangan dan permukiman 198,27 Ha, lahan PA Grounf 200,14 Ha dan wedi kengser 3 Ha serta perairan umum 30 Ha.

### 3.7.3 SARANA PRASARANA DESA KARANGWUNI

Desa Karangwuni dilalui prasarana jalan Kabupaten dari SD Karangwuni-Wojowalur sepanjang 2,5 km dan jalan propinsi yang berkembang menjadi jalan nasional Jalur Lintas Selatan Jawa sepanjang 3,5 km. Kedua jalan ini menjadi jalur arteri dan kolektor yang menghubungkan jalan lingkungan dan permukiman desa.

Sumber air untuk irigasi sawah Desa Karangwuni berasal dari air permukaan yang dibendung dari Pekik Jamal melalui saluran sekunder Daerah Irigasi Pekik Jamal Barat dan drainase Kali Peni yang dibendung kembali di Teteg Bok Keboan dan Bok Karangwuni. Sedangkan untuk air minum atau MCK dan irigasi tegalan/lahan pesisir menggunakan air tanah sumur galian dan sumur pantek/bor dan tadah hujan.

Desa Karangwuni juga telah tersambung listrik dari PLN. Semua rumah yang ada di Desa Karangwuni sudah menggunakan listrik. Penerangan pada jalan Deandles juga sudah menggunakan penerangan dari PLN namun untuk jalan lingkungan dan jalan lokal menggunakan penerangan listrik swadaya dari masyarakat.

PPI Tanjung Adikarto juga berada di Desa Karangwuni, tepatnya berada di dusun Keboan. Selain terdapat pelabuhan, juga sudah terdapat balai desa, puskesmas dan sekolah.

### 3.7.4 TOPOGRAFI DESA KARANGWUNI

Topografi Desa Karangwuni relatif datar dengan ketinggian berkisar antara 0-10 mdpl dan terbagi menjadi tiga wilayah geografis yang meliputi:

#### A. Baigan Utara

Dataran rendah terbentuk dari tanah lumpur endapan (*alluvial*) dan dari erosi pegunungan Menoreh dari Kokap dan Clereng selama berpuluh tahun melalui Kali Nagung dan Kali Serang sehingga daerah yang semula rawa menjadi lahan sawah setelah dilakukan penyudetan atau bedah Kali Glagah. Kawasan ini digunakan sebagai kawasan budidaya pertanian sawah padi dan



surjan karena memiliki tanah yang subur. Namun karena dekat dengan akses sumber air Kali Serang maka sisi utara berkembang berubah fungsi sebagai kawasan permukiman dan pekarangan menjadi Pedukuhan Trukan / Karanganyar dan Karangrejo.

#### B. Bagian Tengah

Berupa dataran rendah antara Kali Peni sampai batas PAG yang relatif bergelombang dengan lereng  $2^{\circ}$ - $20^{\circ}$ . Bagian tengah tersusun dari banyak gumpuk pasir dengan lingkungan peralihan antara ekosistem laut dan darat. Wilayah ini sejak semula dikembangkan sebagai kawasan permukiman dan pekarangan serta budidaya pertanian lahan kering. Akibat sulit air permukiman berpencar ke bagian utara dekat Kali Serang.

#### C. Bagian Selatan

Bagian selatan merupakan gumpuk pasir dataran rendah bergelombang yang terdiri dari tanah PAG, sempadan pantai selebar 200 meter. Bagian selatan semula dihuni oleh pembuat garam laut yang kemudian ditinggalkan tidak berpenghuni. Wilayah ini berfungsi sebagai kawasan lindung sempadan pantai dan kawasan budidaya pertanian lahan pesisir. Pengambilan pasir pantai tanpa ijin penambangan di beberapa titik lokasi yang dilakukan tanpa memperhatikan Amdal dan tidak dilakukan reklamasi telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan degradasi lahan.

Secara administrasi kewenangan desa di laut tidak diatur dalam UU Pemerintah Daerah, tetapi karena peran dan fungsi laut baik secara ekologi maupun ekonomis bagi kehidupan masyarakat Desa Karangwuni sangat besar maka Samudera Hindia dari garis pantai sampai 200 meter sebagai Zona Ekonomi Eksklusif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Desa Karangwuni.

### 3.7.5 POTENSI PENGGUNAAN LAHAN

#### A. Pertanian

Kegiatan usaha pertanian tidak saja diarahkan pada pertanian tanaman pangan yang menunjang kebutuhan pangan, tetapi lebih bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Untuk itu petani lebih berani beralih ke jenis

komoditas tanaman yang lebih padat modal dan menjanjikan keuntungan. Pembangunan sektor pertanian dilakukan secara *off-farm* seperti penyediaan kredit modal dan penanganan pasca panen. Sedangkan *on-farm* dengan bantuan saprotan dan alsintan. Selain itu dilaksanakan pula program penguatan kelembagaan kelompok, intensifikasi dan extensifikasi pertanian, rehabilitasi dan konservasi lahan, pemuliaan dan perbaikan genetika, serta pengembangan budidaya tanaman yang bernilai ekonomi tinggi.



Gambar 3.20 Perkebunan di Lahan Kering  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015

#### B. Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Desa Karangwuni memiliki lahan basah yang luas untuk usaha budidaya perikanan. Lahan basah itu berupa kolam/tambak, sawah, dan perairan umum. Peluang usaha produksi yang dapat dilakukan antara lain mina padi, mina kebun rakyat, mina pasir, kolam ikan, keramba ikan, pemancingan dan perikanan tangkap sungai. Untuk perikanan tangkap di Samudera Hindia hanya menggunakan kapal ikan/perahu motor tempel dan masih menunggu penyelesaian prasarana dermaga dan kolam pelabuhan Tanjung Adikarto yang diproyeksikan menjadi kawasan pelabuhan perikanan samudera untuk armada penangkapan ikan jarak jauh (*far distant fishery fleet*).

#### 3.7.6 KONDISI TAPAK

Tapak Kampung Nelayan tidak berkontor atau relatif datar. Hanya saja jenis tanahnya yang berpasir menjadikan adanya gundukan pasir berukuran kecil akibat terbawa angin. Di sisi selatan tapak terdapat tambang mineral logam yang merupakan tanah Pakualam (*Pakualam Ground*).



Gambar 3.21 Kondisi Eksisting Tapak Kampung Nelayan  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi kemudian diolah, 2015

### 3.7.7 KONDISI LINGKUNGAN SEKITAR TAPAK KAMPUNG NELAYAN

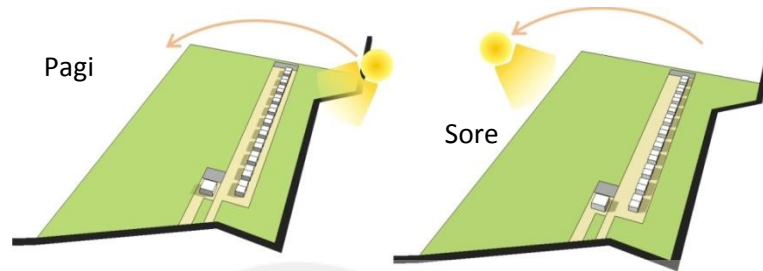
#### A. Pola Lingkungan

Tapak merupakan perkampungan nelayan yang dibangun pemerintah sehingga orientasi dan tata letak bangunan berbentuk linear menghadap pada 1 arah, yaitu ke barat. Karakteristik bangunan sederhana dan penampilan serupa.



Gambar 3.22 Tipologi Bangunan di Tapak Kampung Nelayan  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015

Pencahayaan alami terasa panas, terutama pada siang hari dikarenakan arah hadap rumah ke arah matahari sore. Sebagai antisipasi panas, warga Kampung Nelayan menambahkan tirai bambu di depan rumah masing-masing.



Gambar 3.23 Pola Lingkungan dan Orientasi Bangunan di Tapak Kampung Nelayan  
Sumber: Analisis Penulis, 2016

#### B. Intensitas Pemakaian Lahan

Lahan di sisi timur merupakan area permukiman Kampung Nelayan. Sedangkan disisi barat dan utara merupakan area perkebunan milik warga Kampung Nelayan. Sedangkan di sisi selatan merupakan pintu gerbang menuju kawasan Kampung Nelayan yang berbatasan langsung dengan penambangan mineral logam.

#### C. Fungsi Bangunan

Di daerah sekitar tapak mayoritas merupakan bangunan permukiman dengan bentuk bangunan kampung yang memiliki tinggi sekitar 4 meter. Selain permukiman, di sisi jalan utama bangunan permukiman juga berfungsi sebagai toko sembako, warung makan dan bahan bangunan. Di sisi selatan terdapat area tambang mineral logam, di sisi barat daya merupakan bangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.